

## **PANDANGAN JURGEN HABERMAS TENTANG AGAMA DAN RUANG PUBLIK**

### **Pendahuluan**

Keyakinan-keyakinan religius merupakan persoalan privat dan karena itu harus disingkirkan dari proses deliberasi politik. Para pendukung tesis privatisasi agama ini membangun argumentasinya bahwa dalam persoalan politik atau pengambilan keputusan politik, rujukan pada keyakinan atau otoritas agama tidak dapat diterapkan di dalam masyarakat plural. Sebab argumentasi berbasis religius tersebut sudah pasti tidak akan mendapat persetujuan dari semua warga negara. Dari perspektif hermeneutis, argumentasi religius tidak akan dipahami oleh warga non-religius atau sekuler. Juga praktik kekuasaan negara didasarkan pada pandangan agama atau ideologi tertentu berdampak secara politis pada perlakuan yang tidak setara terhadap warga yang setara. Karena itu argumentasi religius tidak memiliki tempat dalam diskursus politik publik. Diskursus normatif tentang privatisasi agama dalam beberapa waktu terakhir mengalami gugatan. Secara sosiologis depolitisasi agama tidak dapat dipaahami sebagai konsekwensi yang seharusnya dari proses modernisasi. Dari perspektif ajaran Kristen juga dapat dikatakan bahwa privatisasi agama bertentangan dengan karakter publik pewartaan Yesus yang direfleksikan secara intelektual dan diwartakan oleh Gereja.

Ada tiga paradigma yang menjelaskan peran agama di ruang publik:

1. Pandangan yang mengatakan bahwa agama harus ditempatkan di ruang privat.
2. Penegasan bahwa agama-agama boleh terlibat dalam diskusi politik di ruang publik tanpa batasan-batasan.
3. Agama dapat terlibat di dalam diskursus politik jika ia hanya membatasi diri pada pernyataan-pernyataan yang dapat dimengerti dengan akal budi.

### **Pandangan Habermas tentang Relasi antara Agama dan Ruang Publik**

Pada tahun 1980an dalam karyanya berjudul *Theorie des kommunikativen Handelns* ia masih berpegang teguh pada teori klasik tentang sekularisasi. Modernitas dipahami di sini sebagai produk proses rasionalisasi dan diferensiasi sistem-sistem sosial yang kian bertambah, seperti yang tampak dalam fenomena pemisahan antara Gereja dan negara, karya seni dan moral. Meningkatnya proses rasionalisasi atas yang sakral menyebabkan hilangnya dan transformasi komunikatif pandangan-pandangan substansial religius dan metafisis. Namun pada akhir tahun 1980an Habermas mulai mengambil posisi skeptis agnostik dan meninggalkan pandangan yang linear tentang evolusi sosial. Ia mendorong agar rasionalitas postmetafisik lebih banyak menahan diri dan tidak masuk terlalu jauh ke ranah iman. Filsafat tidak dapat memberikan hiburan dan pengharapan yang biasanya disediakan oleh agama-agama. Filsafat belajar banyak dari potensi semantik tradisi-tradisi agama. Karena itu filsafat postmetafisik tidak dapat menggantikan atau

menggeser agama ke ruang privat. Pada tahap ini Habermas juga belum memastikan apakah koeksistensi antara agama dan pemikiran postmetafisik bersifat permanen atau sementara. Dalam karya-karyanya sejak 2001, Habermas menggarisbawahi kemungkinan dialog permanen antara agama dan pemikiran postmetafisik. Agama dipandang sebagai partner yang paling cocok dalam usaha mengatasi paham modernitas sekuler yang pincang, seperti tampak dalam dominasi model-model rasionalitas yang ekonomis, teknologis, dan naturalistik. Justru diskusi dengan ilmu biologi dan neurologi menunjukkan secara jelas bahwa sejumlah ungkapan perasaan moral tertentu baru menemukan rumusan yang akurat dalam bahasa agama.

Pemikiran postmetafisik tidak memusuhi agama secara agresif, tapi sebaliknya membangun dialog yang produktif dengan agama. Pandangan ini bermula pada refleksi Habermas yang diulas dalam karyanya yang terbaru berjudul *Auch eine Geschichte der Philosophie*. Relasi antara iman dan pengetahuan membentuk struktur dasar refleksi Habermas dalam karyanya, namun karya ini tidak menyuguhkan sebuah ulasan filsafat agama atau teologi. Rujukan yang sangat luas dan mendalam kepada karya-karya filsafat agama dan teologis tidak menunjukkan bahwa Habermas sedang kembali ke pandangan yang eksklusif dan komprehensif tentang agama. Habermas tidak mengemukakan tesis bahwa rasionalitas tanpa iman, negara sekuler tanpa agama akan mengambang dan kehilangan fundamen pijaknya. Untuk Habermas, pemikiran postmetafisik adalah dan tetap merupakan sebuah pemikiran sekuler. Pemikiran postmetafisik yang tercerahkan tidak mengumumkan perang agresif melawan agama, tapi sebaliknya membangun relasi yang produktif. Pemikiran postmetafisik mengerti dirinya lebih baik jika ia membangun refleksi tentang dirinya dalam relasi dengan yang lain, yakni iman religius.

Agama-agama tampil lebih meyakinkan dengan jawabannya yang partikular, namun efektif. Karena itu agama-agama selalu menjadi tantangan bagi pemikiran postmetafisik yang terus berusaha untuk membangun legitimasi keberadaannya. Tantangan agama-agama terhadap filsafat bukan karena karakter agama-agama sebagai salah satu dari model pandangan hidup yang memberikan penjelasan tentang dunia sebagai sebuah kosmos dan memberikan justifikasi atas tindakan kita. Hal itu dapat dilakukan sendiri oleh akal budi sekuler lewat karya-karya ilmu pengetahuan modern, moralitas otonom dan hukum positif. Agama-agama lebih menawarkan model-model mengatasi krisis-krisis eksistensial yang berkaitan dengan kondisi keberadaan manusia di tengah dunia. Agama yang tetap menjaga relasi dengan praksis ritual sebuah komunitas umat beriman. Agama akan menjadi tantangan serius bagi modernitas. Agama merawat “kesadaran tentang sesuatu yang hilang” dalam bentuk ritus yang belum dimiliki oleh budaya sekuler atau di mana budaya sekuler belum memiliki padanannya. Karena itu analisis tentang relasi antara mitos dan ritus merupakan salah satu pokok utama dalam karya Habermas yang merangkum, merangkai secara sistematis dan mendalami seluruh pemikirannya tentang relasi antara iman dan pengetahuan.

Habermas memiliki pandangan yang inklusif terkait peran agama di dalam negara sekuler yang plural. Dalam diskusi tentang peran publik agama dalam negara sekuler, Habermas tidak menggunakan konsep pembatasan keyakinan religius, tetapi menganjurkan penggunaan term terjemahan. Dalam proses formasi opini politik publik, pandangan-pandangan agama tidak boleh dibatasi, melainkan dapat diterjemahkan agar “makna profan” tetap dapat diselamatkan bagi para warga sekuler. Menurut Habermas, tugas “menerjemahkan” keyakinan-keyakinan religius ini tidak boleh hanya dibebankan kepada warga religius, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama warga religius dan sekuler. Kerja sama ini dapat mengurangi beban warga religius dan juga menyadarkan warga sekuler akan “potensi semantis” dari agama-agama. Proses saling belajar

dan kerja sama antara warga religius dan sekuler tersebut urgen bukan saja karena tuntutan masyarakat plural, tapi juga karena memiliki nilai epistemik. Artinya lewat proses saling belajar tersebut umat beragama dan warga sekuler mampu mengatasi tantangan-tantangan kognitif masyarakat modern. Bagi umat beragama, proses adaptasi tersebut dapat menciptakan kesadaran religius modern. Kesadaran tersebut memungkinkan mereka untuk menemukan cara menyelaraskan klaim-klaim kebenaran doktrin agamanya dengan pluralitas doktrin lainnya yang memiliki klaim kebenaran serupa tapi inkompatibel. Umat beragama juga harus belajar membangun relasi yang harmonis antara otoritas ilmu pengetahuan alam dengan klaim-klaim kosmologis doktrin agama. Warga religius juga harus menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan sekuler dengan menempatkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam pandangan hidup dan orientasi nilai mereka.

Habermas menekankan bahwa perkembangan minatnya terhadap tradisi agama didasarkan pada penilaian yang semakin skeptis atas arah jalan modernitas. Sikap skeptis ini bertolak dari kecemasan Habermas akan arah sejarah modernitas yang sesat. Untuk mendeskripsikan patologi ini Habermas menggunakan metafora tergelincir ke luar rel dan juga proses sekularisasi masyarakat yang tergelincir ke luar rel yang seharusnya. Menurut Habermas, tradisi agama merupakan salah satu dari sumber daya etos tersebut. Agama memang bukan merupakan sumber etos satu-satunya atau yang menentukan. Kendatipun demikian tradisi religius menurut Habermas memainkan peran khusus dan luar biasa karena agama mengandung potensi makna dan yang memberi arti. Habermas mengangkat contoh potensi tersebut semuanya dari tradisi Kristen, seperti konsep dosa dan kehilangan maknanya ketika diterjemahkan ke dalam konsep kesalahan, paham tentang citra Allah dan transposisi kreatif yang menyelamatkan ke dalam konsep martabat manusia, ide tentang Kerajaan Allah dan terjemahan ke dalam imperatif solidaritas sosial.

Habermas mengakui di satu sisi bahwa “retakan historis antara ilmu pengetahuan sekuler dan wahyu agama” tidak dapat disambung kembali. Akan tetapi di sisi lain pemikiran postmetafisik tidak dapat memahami dirinya sendiri dengan baik jika ia tidak merefleksikan tradisi agama sebagai bagian dari genealoginya. Agama yudeo-kristiani berakar di dalam zaman antik yang juga menjadi tempat asal filsafat. Keduanya sama-sama mengalami transformasi kognitif dari mitos menuju logos. Keduanya diwarnai dengan proses helenisasi dan proses apropriasi konsep dan motif timbal balik yang melampaui Kant dan Hegel. Tradisi Yudeo-Kristiani telah menciptakan kultur intelektual yang ditandai dengan daya refleksi dan kesadaran diri kritis. Atas dasar latar belakang bersama dari iman dan pengetahuan ini, Habermas menegaskan bahwa dalam masyarakat post-sekuler dewasa ini pandangan dunia sekularistik dan naturalistik murni tidak dapat dipertahankan lagi.

### **Relevansi Peran Agama Dalam Ruang Publik**

Dari Habermas, kita optimis bahwa hubungan saling pengertian antara kelompok agamis dan sekuler itu mungkin dicapai. Sangat mungkin nilai-nilai dalam demokrasi pluralistik dapat diambil dari tradisi religius, dengan demikian agama kendati berbahaya bagi demokrasi tidak perlu dinafikan karena dapat berkontribusi demi kemanusiaan yang juga dijunjung demokrasi.<sup>1</sup> Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan-aturan yang ada. Adanya

---

<sup>1</sup> Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 215.

hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antar kedua entitas tersebut. Negara yang didominasi unsur kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan melahirkan negara teokrasi yang cenderung melahirkan adanya sikap atau etika tertentu yang ditunjukkan para pemuka agama.

Agama diyakini sebagai sistem kepercayaan yang mengajarkan kesetiaan total manusia kepada Tuhan secara vertikal. Sementara demokrasi, senantiasa mengasumsikan proses tawar-menawar antara sesama manusia secara horizontal. Agama jelas datangnya dari Tuhan, tetapi makna dan aktualisasi agama baru akan berwujud, ketika agama dipahami, dihayati, dan dipraktikkan oleh pemeluknya dalam realitas. Oleh karena itu, relasi agama dan demokrasi menjadi sebuah keharusan, walaupun ada banyak pro dan kontra di dalamnya. Kepentingan untuk merawat dan memelihara kebangsaan dapat dilihat pada bagaimana agama diberi ruang sebagai spirit menjalankan aktivitas politik kenegaraan, dalam arti nilai-nilai moralitas agama harus terinternalisasi dalam aktivitas kebangsaan sehingga terbentuklah moralitas bangsa yang tumbuh dari moralitas orang beragama.<sup>2</sup>

Di berbagai masyarakat di dunia, agama memainkan peranan penting dalam perdebatan publik maupun isu-isu sosial lainnya. Agama bisa mendorong terciptanya mentalitas dan sistem politik demokratis, asalkan mampu menafsirkan ulang tradisi dan sejarahnya sendiri dengan cara-cara yang aktual dengan perkembangan zaman. Demokrasi bisa memperoleh sumber spiritual yang kokoh dan mendalam dari ajaran-ajaran agama, dan mendorong setiap orang untuk melakukan tindakan-tindakan baik, dalam konteks pribadi maupun sosial. Peran agama adalah memberikan batasan atau arahan yang baik dan tidak baik. Sebab pada dasarnya agama dijadikan sebagai landasan dasar dari tindakan-tindakan bermoral manusia. Selain itu, agama juga memiliki peran dalam menjaga persatuan dan kesatuan yang ada dalam masyarakat majemuk.

---

<sup>2</sup> Subhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral* (Malang: Intrans Publishing, 2013), hlm. 63.